

**UPAYA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DALAM MENDORONG
IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DI INDONESIA**

(President Joko Widodo's Effort in Implementing Sustainable Development Goals in Indonesia)

Zaki Arianto

Adde Marup Wirasenjaya, SIP., M.A

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

zaki.arianto.2014@fisipol.umy.ac.id

Abstrak

Pembangunan merupakan hal yang penting bagi setiap negara. Namun dilain sisi pembangunan juga dapat membawa hal negatif jika pembangunan tidak memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan yang berbasis ekonomi sering kali menciptakan kesenjangan-kesenjangan yang pada akhirnya pembangunan tidak lagi dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pada tahun 2015 PBB melalui UNDP melahirkan suatu agenda pembangunan yakni sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan keberlanjutan dari milenium development goals. Komitmen agenda pembangunan global ini dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019. RPJMN Tahun 2014 – 2019 ini merupakan refleksi dari visi-misi Presiden Joko Widodo yakni Nawacita. Dalam hal ini presiden Joko Widodo ingin mengintegrasikan agenda pembangunan nasional dengan agenda pembangunan global. Upaya pengintegrasian ini sebagai salah satu dorongan Presiden Joko Widodo dalam mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Selain pengintegrasian SDGs dan Nawacita presiden Joko Widodo juga mendorong pembangunan alternatif yakni pembangunan manusia dan pembangunan green economy dalam mengimplementasikan SDG

Keyword : Sustainable Development Goals, Nawacita, Joko Widodo, RPJMN 2014-2015

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia sendiri dilandasi oleh semangat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa, filosofi pembangunan Indonesia tercantum pada UUD 45 baik pada isi ataupun batang tubuh. Pada alinea ke keempat UUD 1945 disebutkan bahwa negara RI bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (Siahaan,2007 dalam Ermawanto,2010 Hal 4) jika di lihat dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat terjadi kontradiktif antara tujuan dan implementasinya, pembangunan di Indonesia masih tertumpu pada pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara sentralisasi sehingga mendorong ketidakmerataan pembangunan dan muncul kesenjangan satu daerah dengan daerah lainnya. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang dapat meningkatkan kemiskikinan, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, serta akses kesehatan yang kurang berkualitas.

Permasalahan pembangunan Indonesia juga terletak pada tingginya disparitas (kesenjangan) antarwilayah. Menurut Armida Alisjahbana Hal ini terlihat dari segi kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, sampai tingkat kemiskinan yang begitu timpang. Adanya disparitas tersebut terjadi karena aktivitas ekonomi yang juga timpang. Di kota yang menjadi pusat bisnis, segala sarana dan prasarana tergarap dengan baik. Akan tetapi, di daerah yang bukan pusat bisnis, sarana dan prasarana tidak tergarap. Hal ini kemudian yang membuat aktivitas ekonomi jadi rendah di banyak daerah. Aktivitas ekonomis rendah, tingkat kemiskinan pun menjadi tinggi (Kompas.com:2010)

Pemerintah Indonesia pada era Joko Widodo melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* dengan mengadopsi hasil kesepakatan *Sustainable Development Goals* melalui prinsip Nawa Cita yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah negara (RPJMN) 2015-2010. Nawa cita sendiri merupakan visi Joko Widodo yang merupakan refleksi dari pemikiran Trisakti Presiden Soekarno. Presiden Joko Widodo percaya bahwa konsep Nawa Cita mampu mengatasi berbagai problematika yang dihadapi masyarakat dan dapat menjadi haluan dalam panduan melewati jalan perubahan menuju kesejahteraan.(Kumolo,2017:40) Menurut Warsito Raharjo Nawacita sebagai fondasi utama untuk mereformasikan kembali pembangunan Indonesia, karena pembangunan sekarang ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi, sehingga menimbulkan disparitas antar wilayah. Sehingga konfigurasi Nawa Cita dan SDGS sangat tepat untuk diimplementasi dalam fondasi pembangunan nasional Indonesia.

Michael Bobby Hoelman, Senior Adviser INFID menyatakan bahwa SDGs penting karena inter-koneksi pembangunan memerlukan tindakan bersama untuk menanggulangi masalah global, yang juga menjadi masalah Indonesia, seperti; kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Agenda SDGs menjadi salah satu panduan atau referensi bagi kerjasama pembangunan global pasca MDGs. Lebih lanjut Michael menyatakan Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan pembahasan SDGs dengan RPJMN. Pemerintah perlu memastikan ambisi rencana jangka menengahnya terutama terhadap target dan indikator SDGs. Secara khusus, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap tujuan-tujuan yang masih tertinggal sekaligus terhadap orientasi-orientasi strategis tujuan pembangunan global berkelanjutan. SDGs sekarang ini

perlu diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional dan bahkan daerah

PEMBAHASAN

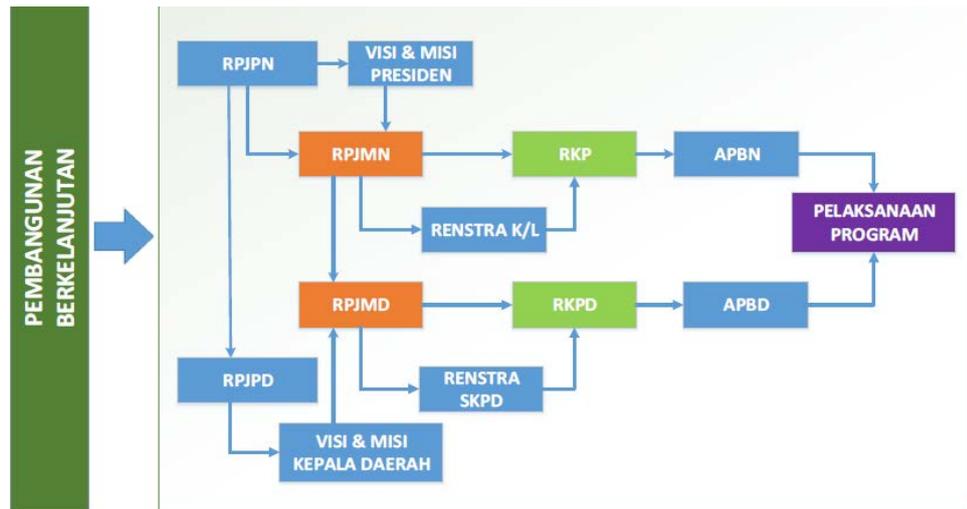
Integrasi Nawacita dan Sustainable Development Goals Dalam Perencanaan Pembangunan Era Pemerintahan Joko Widodo

Komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah dimulai dari presiden-presiden sebelumnya. Komitmen tersebut ditandai dengan Komitmen pemerintah melanjutkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 serta program-program pemerintah lainnya. Program-program tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta lingkungan serta pemeliharaan daya dukung guna membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. (Abdoellah, 2016)

Pada tahun 2015 Indonesia yang diwakili oleh wakil presiden Jusuf Kalla menandatangani kesepakatan SDGs dan menyampaikan bahwa poin-poin SDGs dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional. Indonesia memiliki prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta Nawa Cita menjadi arah dalam agenda pembangunan nasional dan sedangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu TPB/SDGs menjadi bagian dalam acuan pembangunan nasional dan daerah. (BAPPENAS,2017)

Terdapat konvergensi ataupun kesamaan Poin-poin yang berada dalam SDGs dan Nawacita. Dalam hal pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologi dan konservasi keduanya dapat sejalan selaras. Oleh karena itu Nawa Cita dan SDGs dapat diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Nasional. selain itu dalam pendekatan yang inklusif, keterlibatan masyarakat internasional, berbagai jenis kegiatan teknis yang menopangnya dapat membawa banyak hal ke dalam agenda nasional. hal ini termasuk perpektif dan pendekatan kebijakan baru yang melibatkan masyarakat, sektor swasta dan organisasi pengabdian, serta yang menjadi perhatian adalah pengintegrasian agenda global dan nasional diperlukan pendanaan hingga perencanaan yang matang. (UNDP, 2015)

Dalam perencanaan pembangunan tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka 5 tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD. RPJMN 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah dilaksanakan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. (BAPPENAS,2017) Berikut gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan tingkat nasional dan daerah dapat dilihat dalam gambar 1.1 :



Gambar 1.1 Integrasi pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (BAPPENAS,2017)

Dari gambar diatas, dapat dilihat bagaimana integrasi pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional dan daerah. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara atau Daerah dan diterjemahkan oleh setiap kepala negara dan kepala daerah melalui visi dan misinya, kemudian dari terjemahan visi misi oleh kepala negara atau kepala daerah maka dijadikan sebuah rencana pembangunan nasional ataupun daerah, dari hasil RPJMN/RPJMD maka dibuat sebuah Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD untuk menjadi Rencana Kerja tahunan Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaan program maka bersumber dari dana APBN dan APBD. Dengan pola integrasi seperti ini maka pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan baik ditingkatan pusat ataupun tingkatan daerah.

Kesesuaian Target SDGs dan Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan nasional jangka menengah telah didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun RPJMN disusun tahun 2014 namun banyak dari target SDGs sudah tercakup dalam prioritas pembangunan nasional. dari sebanyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 96 target telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

Pilar / Goal SDGs	Target Global	Target RPJMN 2014-2019	Prioritas Nasional
Ekonomi (7,8,9,10,17)	54	30	- Kedaulatan Energi - Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional - Peningkatan Daya Saing

			<p>Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun Konektivitas Nasional - Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah - Pelaksanaan Politik LN bebas aktif
Sosial (1,2,3,4,5)	47	27	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan - Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Peningkatan Kedaulatan Pangan - Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat - Melindungi anak perempuan dan kelompok marjinal
Lingkungan (6,11,12,13,14,15)	56	31	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan Air - Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman - Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi iklim dan Kebencanaan serta Pengurangan Emisi Karbon - Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan - Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana - Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hukum dan Tata Kelola (16)	12	8	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI - Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan - Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Total	169	96	

Sumber : Sekretariat SDGs Nasional 2015

Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Target RPJMN Sesuai Dengan Target SDGs

Jika dilihat berdasarkan pilar SDGs, pilar ekonomi mencakup tujuan 7,8,9,10 dan 17 dengan 54 target dari poin SDGs sedangkan dalam agenda nasional sebanyak 30 target telah sejalan dengan agenda prioritas nasional. Di pilar sosial mencakup 5

tujuan yakni 1,2,3,4 dan 5 dengan 27 target dari poin SDGs sedangkan dalam agenda nasional hanya sebanyak 27 target yang selaras dengan RPJMN. Untuk pilar lingkungan mencakup tujuan 6,11,12,13,14 dan 15 dengan 56 target dan sebanyak 31 target yang diakomodasikan dalam agenda pembangunan nasional. selanjutnya pada pilar hukum dan tatakelola dengan 1 tujuan yakni tujuan 16 dengan memuat 12 target, sebanyak 8 target SDGs sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. (BPS, 2017)

Selain itu program Nawacita yang diusung pemerintahan Jokowi sudah dipetakan dengan tujuan-tujuan yang ada di SDGs. Dari 9 agenda Nawacita, semua agenda telah selaras dengan 17 tujuan/goal yang ada di SDGs. Dengan demikian agenda Nawacita pemerintahan Jokowi mendukung pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Pada tabel 3.2 terlihat bahwa sejumlah goal atau tujuan yang sama dalam SDGs dicapai melalui beberapa program Nawacita yang berbeda

Agenda Nasional (Nawacita)	SDGs
Nawacita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Goal 3, 10, 16, 17
Nawacita 2 Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Goal 16
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan	Goal 1-11
Nawacita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya.	Goal 16
Nawacita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Goal 1-6
Nawacita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	Goal 1-10
Nawacita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Goal 1-5,8,9 dan 12-15
Nawacita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa	Goal 3,4 dan 11
Nawacita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Goal 5,10,16,17

Tabel 1.2 Kesusuaian Nawacita dan poin SDGs

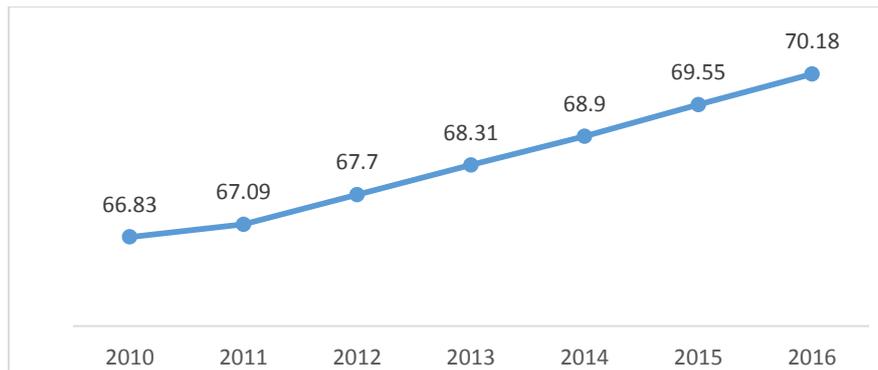
Dalam hal pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan, baik SDGs dan Nawacita berjalan selaras. Dalam hal pembangunan ekonomi juga menunjukan bahwa SDGs dan Nawacita juga sejalan. Namun dilain sisi yakni dalam hal keberlanjutan, ekologi, konservasi dan lingkungan hidup Nawacita yang tertuang dalam RPJMN harus banyak melakukan penyesuaian dikarenakan Nawacita dan SDGs pada pembangunan ini belum banyak selaras terutama pada penyesuaian konsumsi, produksi yang berkelanjutan, penurunan kerusakan hutan, manajemen air laut dan sebagainya.

Pembangunan Manusia

Pada era Presiden Joko Widodo berbagai kebijakan-kebijakan diarahkan fokus kepada pembangunan manusia. Ada 4 dimensi pembangunan manusia pada era ini yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter. Hal ini juga selaras bagi pemerintah dalam menggunakan pendekatan pembangunan manusia atau teori *people centered development* sebagai pendekatan untuk melaksanakan pencapaian SDGs di Indonesia. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggugat subordinasi mereka melalui organisasi-organisasi lokal secara *bottom-up*. Organisasi yang dianggap paling efektif adalah organisasi yang bermula dengan kebutuhan praktis masyarakat yang konkrit dan berkaitan dengan persoalan kesehatan, ketenagakerjaan dan penyediaan pelayanan dasar. Dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat mengkategorikan kebutuhan praktis dan strategis melalui pemberdayaan atau penguatan diri masyarakat. Oleh karena itu penting kiranya melakukan kategorisasi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat untuk menghindari waktu sebagai determinan perubahan, karena perubahan jangka pendek belum menjamin transformasi jangka panjang dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat tidak secara otomatis berarti terpenuhinya kebutuhan strategis masyarakat.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Joko Widodo lainnya dalam mendorong melakukan pembangunan masyarakat dan selaras dengan SDGs diantaranya adalah mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Kebijakan ini diperuntukkan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal. Yang mana pada poin pengentasan kemiskinan pemerintahan Joko Widodo menekankan pada aspek pendekatan-pendekatan yang mengutamakan memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat.

Dengan melakukan pendekatan pada pembangunan manusia Indonesia berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan manusia dari tahun ketahun. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini

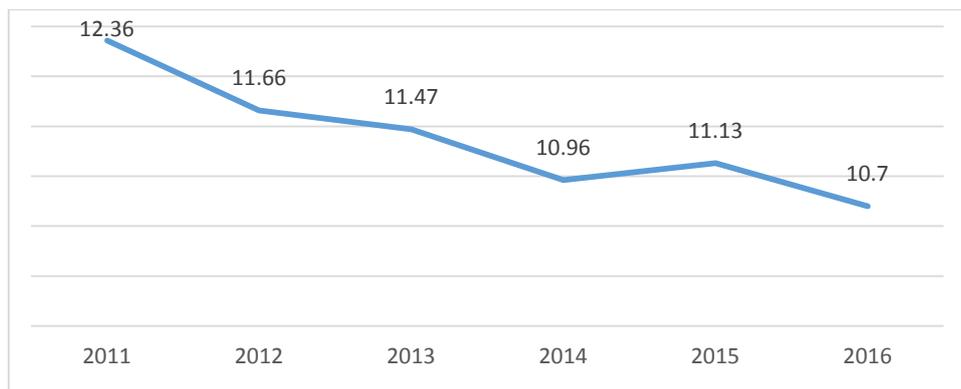


Sumber : diolah dari data BPS (2017)

Grafik 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010 - 2016

Atas pencapaian IPM yang semakin meningkat setiap tahunnya Indonesia menjadi negara dengan kategori *high human development* serta menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia. Pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator yang telah ditentukan oleh UNDP. Pengukuran tersebut menggunakan tiga dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut diturunkan menjadi 4 indikator yang digunakan yakni angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. (BPS, 2017).

Dengan naiknya nilai IPM dan turunnya Indeks Gini berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Dimana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 %. Sedangkan selama periode 2015-2016 tingkat kemiskinan Indonesia menurun menjadi 11,13 % di tahun 2015, menjadi 10,70 ditahun 2016. (Machmudin, 2016). County Director UNDP Indonesia Christophe Bahuet mengatakan bahwa IPM untuk Indonesia menunjukkan kemajuan-kemajuan yang dicapai. langkah selanjutnya menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan serta provinsi-provinsi terpencil. (id.undp.org, 2017). Grafik 4.7 tren penurunan kemiskinan diIndonesia



Sumber : diolah dari data BPS (2017)

Grafik 1.2 Angka Kemiskinan di Indonesia tahun 2011 – 2016

Dari data - data diatas menurut laporan yang diliris oleh Selim Jahan menyatakan bahwa meskipun terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan dalam

beberapa tahun belakangan, masih terdapat 140 juta warga yang hidup kurang dari Rp.20.000 perhari. Dengan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia untuk 2016 sebesar 70,18 % dan menempatkan sebagai negara dengan kategori pertumbuhan IPM tinggi namun IPM Indonesia menurun tajam ke 0,563 bila kesenjangan diperhitungkan. Kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata di Asia timur dan negara-negara Pasifik. (id.undp.org, 2017)

Pada tahun 2017 SDSN (*Sustainable Development Solution Network*) mengeluarkan indeks pelaksanaan SDGs dimasing-masing negara yang disebut dengan SDGs Index and Dashboards Reports. Menurut lembaga yang dipimpin oleh Jeffrey Sachs tersebut bahwa peringkat Indonesia turun dari urutan ke 98 dari 149 negara pada tahun 2016 menjadi peringkat ke 100 dari 157 negara pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan bahwa dari awal tidak ada kebijakan atau program baru dari pemerintah yang menunjukkan Indonesia serius melaksanakan SDGs, semuanya baru sebatas *business as usual*. Dari 169 indikator SDGs yang diadopsi pemerintah kedalam RPJMN hanya sekitar 13,7 % yang sesuai dengan indikator global SDGs. selebihnya, dilakukan pendekatan *proxy* yang belum tentu tepat mampu mengukur pencapaian SDGs. ujar Donny Ardyanto, Program Adviser Yayasan TIFA

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam. begitupula dengan pembangunan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan akan mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan. Perbedaan kepentingan tujuan pembangunan secara nyata telah menimbulkan konflik kepentingan anatara tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan tujuan pelestarian lingkungan baik lingkungan sosial masyarakat ataupun lingkungan alam. (Syadullah, 2010)

Pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan hanya akan bersifat eksploitatif dan berdimensi jangka pendek. Sementara pembangunan nasional harus berorientasi jangka panjang atau biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan agar selaras,serasi dan seimbang antara 3 pilar utama pembangunan yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan ketiga faktor tersebut terutama pada ekonomi. (Hemawan, 2010). Pembangunan ekonomi tidak hanya membuat kemakmuran akan meningkat tetapi juga akan meningkatkan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa pembangunan bukan hanya semata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tetapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan ekologis bangsa. Pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan diharapkan kehidupan makhluk lainnya termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta stabilitas dan integritas semakin terjaga. (Abdoellah, 2017)

Di Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan telah diamanatkan oleh konstitusi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang lingkungan hidup 1972 dan KTT Bumi pada tahun 1992

yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan ekonomi serta KTT pembangunan berkelanjutan pada tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh produksi industri yang berlebihan dan pembangunan yang berorientasi ekonomi konvensional. (Djajadiningrat, 2011)

Selain menggiatkan kembali pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kualitas pembangunan Indonesia mengacu pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan modal manusia, modal masyarakat dan modal alam. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat berkelanjutan jika dibarengi oleh peningkatan modal manusia, modal masyarakat dan modal alam secara keseluruhan dan integratif. (Djajadiningrat, 2011)

Dari fokus ekonomi tersebut maka lahir kebijakan-kebijakan untuk mewujudkannya di antara adalah pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan daya saing tenaga kerja dan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Yang mana pemerintah Jokowi mengencangkan pembangunan ekonomi mikro berbasis UMKM dan mendorong agar masyarakat Indonesia untuk memperhatikan peluang dari ekonomi kreatif serta membangun pusat pelatihan tenaga kerja melalui balai kerja yang tersebar diberbagai daerah dan teintegrasi.

Pada pembangunan ekonomi yang inklusif pada dalam mengurangi disparitas antar wilayah pemerintah Jokowi terus menerus menekankan pembangunan yang merata antar wilayah dengan pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal dan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Hal ini bisa dilihat dengan upaya presiden dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan tertinggal seperti diperbatasan Papua dan Kalimantan. Pembangunan ekonomi yang inklusif ini sangat diharapkan tidak hanya berdampak pada manusia namun juga berdampak pada alam sekitarnya.

Dengan begitu kebijakan-kebijakan ini mengarah kepada suatu pendekatan pembangunan yang mana disebut dengan *green economy*. *green economy* merupakan visi yang meninggalkan praktek ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek dan berdampak negatif pada lingkungan, menjadi praktek ekonomi yang ramah lingkungan (*environment sound economy*) dengan demikian bahwa dipastikan bahwa Indonesia menjadi negara yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Untuk mendukung pembangunan nasional yang bersifat *pro-growth, pro-poor, pro-job*, tersebut dilaksanakan konsep *green economy*. Pendekatan *pro-green* atau pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah upaya untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan alami dan seminim mungkin melakukan penebangan tanaman guna menjaga, memelihara dan mempertahankan sumber daya alam serta menekan emisi karbon serendah mungkin. (Mustopadidjaja AR, 2012) .

Kerusakan-kerusakan lingkungan lainnya seperti, penambangan ilegal, kebakaran hutan serta meningkatnya emisi karbon di Indonesia. mengindikasikan bahwa *green economy* sulit untuk diterapkan di Indonesia. hal ini seperti yang dikemukakan oleh Heru Prasetyo bahwa Undang-Undang tidak

memberikan jalan untuk *green economy*. Termasuk perundangan yang ada dibawahnya seperti Perpres, Permen dan Perda. Ia menambahkan adanya saling timpang tindih peraturan lama yang cenderung eksploitatif pada alam dan kurang mendukung *green economy*. Namun sebaliknya peraturan baru mulai mengarah untuk ramah lingkungan dan membuat kebingungan para penegak hukum ketika diterapkan di lapangan (Zakiya, 2012)

Perpres Sebagai Kerangka Hukum Pelaksanaan SDGs

Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh presiden Joko Widodo membuktikan bahwa adanya komitmen politik dari pemerintah Joko Widodo secara serius melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan sebagai upaya untuk melaksanakan TPB secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak, baik NGO, universitas dan pemangku kebijakan lainnya. (Ardianto dan Santono, 2017). hal ini sesuai dengan pernyataan Michael B Hoelman Senior Advuser International Senior Adviser International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bahwa perpres yang diterbitkan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah secara politik dalam dunia internasional dalam melaksanakan SDGs. Michael menambahkan bahwa perpres ini merupakan alat bantu dan daya ungkit untuk memastikan pembangunan dalam masa kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam memastikan pembangunan sesuai dengan janji Jokowi Widodo ketika berkampanye. (Saeno, 2017)

Perpres ini berisikan dan memuat beberapa keputusan, diantaranya adalah Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, rencana aksi pembangunan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dan daerah, sasaran, tujuan, pendanaan dan kelembagaan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.

Jonna Damanik koordinator program SDGs dan UPR (*Universal Periodic Review*) dari Organisasi Harapan Nusantara mengatakan bahwa kehadiran Perpres mampu memastikan tidak seorangpun tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan. Paradigma inklusifitas dalam keikutsertaan warga selayaknya menjadi dasar partisipasi warga yang dimaksud dalam Perpres No 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs. Prinsip SDGs *leave no one behind* perlu menggunakan perspektif hak asasi manusia, sehingga partisipatif yang terbentuk tidak hanya sekedar melibatkan kelompok tertinggal namun juga melibatkan mereka dalam dialog pembangunan. Hal senada juga disampaikan oleh Lia Toriana, Deputy Program Transparansi Internasional Indonesia, menurutnya Perpres ini dapat menciptakan keadilan baik secara substansial maupun prosedural dan mampu mendorong adanya akuntabilitas pembangunan serta ruang partisipasi bagi warga dalam pembangunan terutama kaum perempuan dan disabilitas yang kerap ditinggalkan. (www.sdg2030indonesia.org, 2017)

Wahyu Susilo, Direktuf Eksekutif Migrant Care, menakankan perlibatan semua pihak harus diimplementasikan di tingkatan pemerintah baik nasional hingga ke daerah-daerah. Indri Oktaviani, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia menuturkan bahwa kelompok-kelompok sipil telah menunggu kehadiran perpres, untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi TPB bersama dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu Perpres perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan mendorong

pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah secara partisipatif. (www.sdg2030indonesia.org, 2017)

Namun setelah 2 tahun hingga saat ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs memandang bahwa sejak hadirnya Perpres 59 tahun 2017, tidak ada kemajuan yang signifikan dilakukan Indonesia untuk melaksanakan SDGs. Michael Bobby Hoelman yang sebelumnya berpendapat bahwa perpres SDGs merupakan jalan untuk melaksanakan SDGs namun setelah diterbitkan perpres tersebut terkesan pelaksanaan SDGs di Indonesia seperti jalan ditempat. Indikasinya adalah ketidakjelasan pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDGs sebagai mandat dari perpres tersebut. Ketidakjelasan ini memunculkan keraguan akan keberhasilan Tim Koordinasi Nasional mewujudkan prioritas presiden untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan disparitas. Dengan ketidakjelasan ini berdampak pada pemerintah daerah dalam menggunakan pendekatan yang sama dalam melaksanakan SDGs. (www.sdg2030indonesia.org, 2017)

Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan SDGs

Proses Perumusan SDGs tidak terlepas dari masukan ataupun aspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, peran pemerintah sangat aktif dalam ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs. Maka muncul slogan bagi pemerintah daerah yakni 'SDGs adalah kita'. Hal ini menunjukkan peranan penting pemerintah kota dan kabupaten dalam mewujudkan agenda pembangunan SDGs diseluruh dunia. (Hoelman, 2015)

Dalam konteks Indonesia, SDGs dapat menjadi momentum yang baik bagi kepala daerah dan birokrasi daerah, jika melaksanakan dan meraih tujuan dengan baik selama target SDGs yakni 15 tahun kedepan. Dikarenakan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam SDGs dapat menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi masalah dipemerintah daerah yakni ketertinggalan, kemiskinan dan korupsi. Hal ini ditambahkan oleh Diah Indrajati Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bahwa pada tingkat pemerintah daerah program-program orientasi kepada kepala daerah dan DPRD mengenai kebijakan-kebijakan strategis ditingkat nasional memuat tujuan pembangunan berkelanjutan harus diaktualisasikan dan dilaksanakan di daerah karna pembangunan berkelanjutan dimaknai dan dipahami sebagai suatu pembangunan yang fokusnya untuk pemenuhan hak-hak masyarakat. (AR, 2017)

Sejak SDGs disahkan tahun 2015, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten diyakini berperan sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. hal tersebut dilandasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan dana yang dapat melakukan berbagai inovasi dan tumpuan penyediaan layanan publik serta kebijakan dan program-program pemerintah lainnya. Beragam keunggulan peran pemda tersebut dapat digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Hal ini menjadi salah satu evaluasi dari kegagalan MDGs di Indonesia yakni peran pemda yang tidak mampu mengoptimalkan tujuan dari MDGs. (SDGs.org, 2016)

Seluruh tujuan dan target SDGs secara langsung ataupun tidak, sangat terkait dengan kerja-kerja pemda baik tingkatan kota dan kabupaten. Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan SDGs menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terlebih bagi Indonesia yang memiliki 500 kota dan kabupaten yang masing-masing daerah memiliki karakteristik yang

berbeda baik secara politik, ekonomi, sosial dan geografis. Namun terdapat beberapa faktor yang membuat pelaksanaan SDGs di daerah dapat berjalan dengan baik, yakni pertama adanya komitmen politik di tingkat lokal, kedua adanya birokrasi ditingkat lokal yang mampu menterjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs dan terakhirnya adanya kelompok masyarakat (LSM) yang kuat ditingkat lokal. (SDGs.org, 2016)

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang melaksanakan program SDGs kedalam program prioritas pembangunannya diantaranya adalah, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Boyolali. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2

Daerah yang mengadopsi SDGs	Poin SDGs	Kebijakan/ Program.
Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan 2. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan disegala usia 3. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua 4. Mencapai kesetaraan gender 5. Menurunkan ketimpangan 6. Melestarikan samudra dan sumber daya kelautan 	Melalui Deklarasi Pangkep
Kota Prabumulih Sumatera Selatan	Energi bersih dan terjangkau	Program gas rumah tangga
Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan 2. Pendidikan berkualitas 	Program Desa Sehat dan Cerdas

Sumber : Di olah dari berbagai sumber

Tabel 1.3 Daerah-daerah yang Implementasi Tujuan SDGs

Tantangan dan Kendala Implementasi SDGs di Indonesia

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya akan memiliki tantangan dan hambatan. Begitu pula dengan mengimplementasikan SDGs di

Indonesia. Dari segi proses pelaksanaan SDGs ditingkat nasional juga masih meninggalkan permasalahan seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non pemerintah dan juga proses partisipasi itu sendiri. Ada beberapa tantangan dan hambatan pelaksanaan SDGs di Indonesia. diantaranya adalah

Pertama, rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam masyarakat ataupun lembaga pemerintah, dapat dilihat sampai pada saat ini penerapan SDGs masih terkesan jalan ditempat. hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam penerapan SDGs dikalangan masyarakat. faktor rendahnya kesadaran dan pemahan pelaksanaan SDGs di Indonesia, karena pada saat ini sosialisasi Indonesia masih dalam pendekatan yang kurang partisipatif walapun tujuan-tujuan dari SDGs sudah terintegrasi dalam rencana pembangunan negara.

Kedua, masalah geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan letaknya berjauhan satu dengan lainnya. Ketimpangan baik ekonomi dan pembangunan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Karakteristik yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain menjadi tantangan dalam Implementasi SDGs dikarenakan setiap daerah harus memiliki pendekatan berbeda dalam mewujudkan poin-poin SDGs didaerahnya ditambah pemerintah daerah memiliki sumberdaya dan kapitas yang terbatas dalam mewujudkan SDGs. dengan keterbatasan dan karakteristik berbeda disetiap daerah membuat pelaksanaan SDGs terhambat didaerah-daerah yang seharusnya menjadi fokus dalam implementasi SDGs. hal ini mengakibatkan melorotnya peringkat Indonesia sebagaimana yang dilaporkan oleh SDSN (*Sustainable Development Solution Network*) SDG Index and Dashboards yang mengatakan bahwa peringkat Indonesia trurun dari urutan ke 98 dari 149 negara pada tahun 2016 menjadi peringkat ke 100 dari 157 negara pada tahun 2017. Dan bahkan di antara negara-negara anggota G20, Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dari Arab Saudi, Afrika Selatan dan India serta di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia berada dibawah Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam dan Filipina. (Saeno, 2017).

Ketiga, masalah pendanaan. SDGs memiliki 17 tujuan yang mana dalam tujuan-tujuan tersebut dipecah menjadi 169 target pelaksanaannya, dengan taget yang banyak maka akan membutuhkan pendanaan yang besar untuk merealisasikannya. Dalam konteks Indonesia sendiri pendanaan pelaksanaan SDGs bersumber dari APBN dan dana-dana yang tidak terikat lainnya, walaupun menurut masalah pendanaan telah diatur dalam Perpres namun menurut Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care hingga saat ini belum ada data ataupun analisa dari pemerintah berapa besar dana yang dibutuhkan Indonesia dalam mencapai SDGs di tahun 2030. (Saeno, 2017)

Dengan tantangan-tantangan yang telah dijelaskan diatas seharusnya tidak perlu dianggap sebagai beban melainkan tantangan yang ada harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030 Oleh karena itu pelaksanaan SDGs di Indonesia membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan aktif dalam pencapaian SDGs namun juga keterlibatan masyarakat, swasta dan LSM. Keterlibatan unsur-unsur sipil tersebut dapat memecahkan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Indonesia terutama pada pembangunan. Keterlibatan peran daerah-daerah, organisasi sipil termasuk perguruan tinggi atau universitas membawa keyakinan bahwa SDGs akan dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan partisipatoris.

KESIMPULAN

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya akan memiliki tantangan dan hambatan. Begitu pula dengan mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Dari segi proses pelaksanaan SDGs ditingkat nasional juga masih meninggalkan permasalahan seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non pemerintah dan juga proses partisipasi itu sendiri. Ada beberapa tantangan dan hambatan pelaksanaan SDGs di Indonesia. diantaranya adalah

Pertama, rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam masyarakat ataupun lembaga pemerintah, dapat dilihat sampai pada saat ini penerapan SDGs masih terkesan jalan ditempat. hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam penerapan SDGs dikalangan masyarakat. faktor rendahnya kesadaran dan pemahan pelaksanaan SDGs di Indonesia, karena pada saat ini sosialisasi Indonesia masih dalam pendekatan yang kurang partisipatif walapun tujuan-tujuan dari SDGs sudah terintegrasi dalam rencana pembangunan negara.

Kedua, masalah geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan letaknya berjauhan satu dengan lainnya. Ketimpangan baik ekonomi dan pembangunan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Karakteristik yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain menjadi tantangan dalam Implementasi SDGs dikarenakan setiap daerah harus memiliki pendekatan berbeda dalam mewujudkan poin-poin SDGs didaerahnya ditambah pemerintah daerah memiliki sumberdaya dan kapitas yang terbatas dalam mewujudkan SDGs. dengan keterbatasan dan karakteristik berbeda disetiap daerah membuat pelaksanaan SDGs terhambat didaerah-daerah yang seharusnya menjadi fokus dalam implementasi SDGs. hal ini mengakibatkan melorotnya peringkat Indonesia sebagaimana yang dilaporkan oleh SDSN (*Sustainable Development Solution Network*) SDG Index and Dashboards yang mengatakan bahwa peringkat Indonesia trurun dari urutan ke 98 dari 149 negara pada tahun 2016 menjadi peringkat ke 100 dari 157 negara pada tahun 2017. Dan bahkan di antara negara-negara anggota G20, Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dari Arab Saudi, Afrika Selatan dan India serta di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia berada dibawah Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam dan Filipina. (Saeno, 2017).

Ketiga, masalah pendanaan. SDGs memiliki 17 tujuan yang mana dalam tujuan-tujuan tersebut dipecah menjadi 169 target pelaksanaannya, dengan taget yang banyak maka akan membutuhkan pendanaan yang besar untuk merealisasikannya. Dalam konteks Indonesia sendiri pendanaan pelaksanaan SDGs bersumber dari APBN dan dana-dana yang tidak terikat lainnya, walaupun menurut masalah pendanaan telah diatur dalam Perpres namun menurut Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care hingga saat ini belum ada data ataupun analisa dari pemerintah berapa besar dana yang dibutuhkan Indonesia dalam mencapai SDGs di tahun 2030. (Saeno, 2017)

Dengan tantangan-tantangan yang telah dijelaskan diatas seharusnya tidak perlu dianggap sebagai beban melainkan tantangan yang ada harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030 Oleh karena itu pelaksanaan SDGs di Indonesia membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan aktif dalam pencapaian SDGs namun juga keterlibatan masyarakat, swasta dan LSM. Keterlibatan unsur-unsur sipil tersebut dapat memecahkan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Indonesia terutama pada pembangunan. Keterlibatan peran daerah-daerah, organisasi

sipil termasuk perguruan tinggi atau universitas membawa keyakinan bahwa SDGs akan dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan partisipatoris.

Referensi

- Abdoellah, O. A. (2017). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- AR. (2017, Juli 13). Retrieved from DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI: http://www.bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1117/kalaborasi_pemerintah_daerah_untuk_pencapaian_sdgs
- BPS. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Djajadiningrat, S. T. (2011). *Ekonomi Hijau*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Hemawan, S. Q. (2010). Keterkaitan Green Bank dengan Pembangunan Berkelanjutan. *Economic Review*, 219.
- Hoelman, M. B. (2015). *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kebijakan*. Jakarta: INFID.
- id.undp.org. (2017, Maret 22). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkat tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada*. Retrieved from <http://www.id.undp.org>: <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>
- Machmudin, B. (2016, Agustus 16). *Presiden Jokowi: 2016 sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional*. Retrieved from <http://www.presidentri.go.id>: <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/president-jokowi-2016-sebagai-tahun-percepatan-pembangunan-nasional.html>
- Mustopadidjaja AR, d. (2012). *BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*. Jakarta: LP3ES.
- Saeno. (2017, September 27). *INFID Kritik Impelementasi SDGs Indonesia*. Retrieved from <http://finansial.bisnis.com>: <http://finansial.bisnis.com/read/20170927/9/693370/infid-kritik-impelementasi-sdgs-indonesia>
- SDGs.org. (2016). *Melokalkan SDGs*. Retrieved from www.sdg2030indonesia.org: <https://www.sdg2030indonesia.org/page/28-lokal>
- Syadullah, M. (2010). *Menuju Green Economy*. Yogyakarta: EKONISIA.
- www.sdg2030indonesia.org. (2017, Juli 25). *Perpres SDGs Tantangan bagi Jokowi untuk Memperkuat Prioritas Pembangunan dan Partisipasi Warga*. Retrieved from www.sdg2030indonesia.org: <https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book>
- Zakiya, Z. (2012, April 17). *Indonesia Sulit Terapkan Green Economy*. Retrieved from <http://nationalgeographic.co.id>: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/04/indonesia-sulit-terapkan-green-economy>

